

PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL DI KABUPATEN BOJONEGORO: MENGUNAKAN PERSPEKTIF *LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT* (LED)

Cindy Karunia Pratama Putri¹, M. Kendry Widiyanto², Hasan Ismail³

^{1,2,3} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

Email: sindikpp@gmail.com¹,
kenronggo@untag-sby.ac.id²,
hasanismail@untag-sby.ac.id³

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan potensi dan daya saing daerah di Kabupaten Bojonegoro melalui pendekatan *Local Economic Development* (LED) menurut Edward J. Blakely, yang mencakup *Locality* (Lokalitas), *Business and the Economic Base* (Bisnis dan Basis Ekonomi), *Employment Resources* (Sumber Daya Ketenagakerjaan), serta *Community Resources* (Sumber Daya Komunitas). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan lokalitas telah mengalami peningkatan, terutama pada perbaikan infrastruktur dasar, tetapi penyebarannya belum merata di seluruh wilayah. Pada aspek basis ekonomi, perekonomian Bojonegoro masih didominasi sektor migas, namun pemerintah daerah telah mulai mendorong diversifikasi melalui penguatan sektor pertanian, UMKM, industri padat karya, dan pengembangan wisata. Pada elemen ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja lokal cukup mencukupi,

tetapi sebagian besar belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga diperlukan perluasan program pelatihan dan sertifikasi. Sementara itu, pada elemen sumber daya komunitas, peran kelembagaan masyarakat sudah terbentuk, namun kapasitas dan partisipasinya masih perlu ditingkatkan. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi dan daya saing daerah di Bojonegoro memerlukan peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, diversifikasi ekonomi, serta kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Kabupaten Bojonegoro, Pembangunan Ekonomi Daerah, Daya Saing Daerah, Potensi Lokal, Pengembangan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of regional potential and competitiveness in Bojonegoro Regency through the Local Economic Development (LED) approach proposed by Edward J. Blakely, which includes the elements of Locality, Business and the Economic Base, Employment Resources, and Community Resources. The research employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews, field observations, and document studies. The findings indicate that local development has improved, particularly in basic infrastructure, although its distribution remains uneven across the region. In terms of the economic base, Bojonegoro's economy is still dominated by the oil and gas sector; however, the local government has begun promoting diversification by strengthening agriculture, MSMEs,

labor-intensive industries, and tourism development. Regarding employment resources, the local workforce is sufficiently available, but many workers still lack skills aligned with industrial needs, necessitating the expansion of training and certification programs. Meanwhile, within community resources, community institutions are present but their capacity and participation still need enhancement. Overall, the study shows that the development of regional potential and competitiveness in Bojonegoro requires improvements in infrastructure quality, strengthened human resources, economic diversification, and stronger collaboration among the government, communities, and business actors.

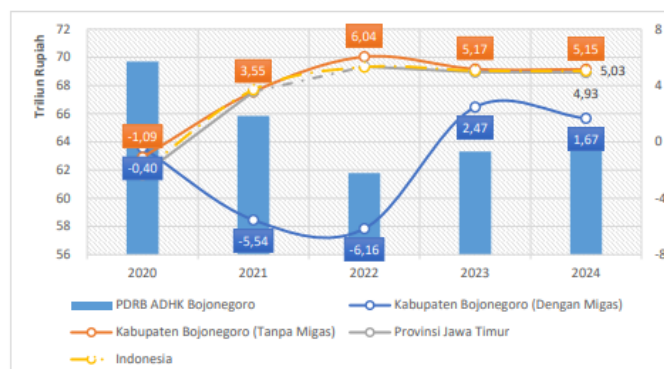
Keywords: *Economic Growth, GRDP of Bojonegoro Regency, Regional Economic Development, Regional Competitiveness, Local Potential, Economic Development*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah, setiap kebijakan pembangunan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini dikarenakan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah berbeda-beda, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mampu menentukan sektor ekonomi unggulan yang dapat dioptimalkan guna mendorong peningkatan perekonomian wilayahnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi sektor unggulan adalah metode ekonomi basis. Sektor basis dipandang sebagai tulang punggung perekonomian daerah karena memiliki daya saing (*competitive advantage*) yang relatif tinggi. Sementara itu, sektor non-basis dianggap kurang potensial, namun tetap memiliki peran penting sebagai pendukung sektor basis atau sebagai industri penunjang (*service industries*) (Andika Putra Trijayanto, 2017).

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat (Meli Handayani Catur Putri, 2022). Pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB tidak hanya menjadi indikator capaian ekonomi, tetapi juga menjadi acuan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas sektor unggulan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola potensi wilayahnya agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertambangan minyak dan gas bumi (*migas*) (Lq et al., 2023). Sektor ini menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari separuh kontribusi PDRB Bojonegoro berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian, khususnya *migas*. Kondisi ini menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sektor ekstraktif. Namun, ketergantungan ini menimbulkan risiko, antara lain fluktuasi harga minyak dunia, penurunan cadangan, serta rendahnya pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro mencatatkan laju pertumbuhan PDRB tertinggi se-provinsi, yakni 9,97%. Disusul Pacitan (9,93%) dan Ngawi (9,89%). Di sisi lain, Kota Kediri justru mengalami kontraksi dengan pertumbuhan minus 0,13%. Peningkatan ini cukup kontras dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, banyak daerah justru mengalami perlambatan, termasuk Bojonegoro yang sempat -3,72% (PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, 2024, n.d.).



Gambar 1. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur & Kabupaten Bojonegoro 2020-2024

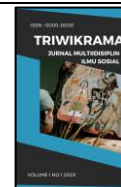
Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro 2025, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Nasional (RPJMD Kabupaten Bojonegoro, 2025-2029).

Gambar 1.1 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Puncak pertumbuhan tercatat pada tahun 2023 sebesar 2,47 persen, sedangkan penurunan terdalam terjadi pada tahun 2022 yang berkontraksi hingga 6,16 persen. Jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional, laju pertumbuhan Kabupaten Bojonegoro relatif mengalami perlambatan. Pasca pandemi Covid-19, perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Indonesia tumbuh positif masing-masing sebesar 3,29 persen dan 3,40 persen per tahun, sedangkan Kabupaten Bojonegoro justru mengalami kontraksi rata-rata sebesar 1,59 persen per tahun pada periode yang sama.

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.005,31	5.932,64	6.097,92	6.321,94	6.335,68	1,22
B	Pertambangan dan Pengaliran	41.664,22	36.827,70	31.118,84	31.080,00	30.456,40	-5,84
C	Industri Pengolahan	3.339,66	3.435,16	3.654,28	3.846,50	4.182,00	4,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,37	14,70	15,81	17,68	19,24	5,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,01	21,38	21,58	22,66	23,91	4,74
F	Konstruksi	3.934,93	4.087,92	4.414,23	4.613,27	4.894,63	4,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.645,80	4.986,74	5.354,70	5.656,87	5.946,66	3,44
H	Transportasi dan Pergudangan	516,57	566,82	676,06	773,40	869,95	9,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	497,29	516,84	586,69	634,09	689,37	5,19
J	Informasi dan Komunikasi	4.330,85	4.645,29	4.881,90	5.201,65	5.482,24	6,57
K	Jasa Keuangan	785,08	794,70	823,38	858,62	902,32	2,84
L	Real Estate	734,80	755,41	800,01	845,45	876,53	4,13
M,N	Jasa Perusahaan	75,18	77,02	81,56	88,56	95,31	3,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.877,02	1.882,59	1.903,10	1.921,84	2.075,07	1,78
P	Jasa Pendidikan	625,56	631,97	638,60	671,41	706,21	2,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	247,91	260,81	270,88	277,11	292,60	5,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	388,86	401,82	443,33	479,64	519,30	2,83
PDRB Migas		69.703,42	65.839,51	61.782,87	63.310,69	64.367,43	-1,59
PDRB Tanpa Migas		28.001,46	28.994,80	30.745,47	32.336,23	34.000,67	3,76

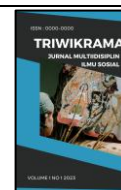
Gambar 1. 2 PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bojonegoro 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro 2025, RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029.



Gambar 1.2 Pada tahun 2020, struktur PDRB Kabupaten Bojonegoro masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai mencapai Rp41.664,22 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Sektor penting lain yang turut menyumbang PDRB adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp4.645,80 miliar, Industri Pengolahan Rp3.339,66 miliar, serta Konstruksi Rp3.934,93 miliar. Sementara itu, sektor Informasi dan Komunikasi juga cukup besar dengan Rp4.330,85 miliar. Kontribusi dari sektor transportasi, akomodasi, listrik, air, maupun jasa sosial relatif masih kecil dibandingkan sektor utama. Pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan di sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi Rp36.827,70 miliar. Namun demikian, sektor lain justru menunjukkan pertumbuhan, seperti Industri Pengolahan naik menjadi Rp3.435,16 miliar, Perdagangan Rp4.986,74 miliar, dan Informasi dan Komunikasi Rp4.645,29 miliar. Sektor Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga meningkat menjadi Rp566,82 miliar dan Rp516,84 miliar. Secara keseluruhan, PDRB tanpa migas tercatat sebesar Rp28.994,80 miliar, menunjukkan peran sektor nonmigas yang konsisten meningkat. Pada tahun 2022, tren kenaikan semakin terlihat di sektor-sektor nonmigas. Industri Pengolahan tumbuh menjadi Rp3.654,28 miliar, Perdagangan Rp5.354,70 miliar, dan Konstruksi Rp4.414,23 miliar. Sektor Transportasi melonjak menjadi Rp676,06 miliar, sedangkan Penyediaan Akomodasi meningkat ke Rp586,69 miliar. Sektor Informasi dan Komunikasi pun naik ke Rp4.881,90 miliar. Meskipun demikian, sektor Pertambangan dan Penggalian terus turun hingga Rp31.118,84 miliar. Total PDRB tanpa migas tercatat sebesar Rp30.745,47 miliar, memperlihatkan kontribusi pertumbuhan dari sektor nonmigas yang semakin kuat. Pada tahun 2023, sektor Industri Pengolahan mencapai Rp3.846,50 miliar, Perdagangan Rp5.656,87 miliar, dan Konstruksi Rp4.613,27 miliar. Sektor jasa-jasa juga mengalami peningkatan, seperti Informasi dan Komunikasi yang melonjak ke Rp5.201,65 miliar, serta Transportasi Rp773,40 miliar. Demikian pula sektor Penyediaan Akomodasi tumbuh menjadi Rp634,09 miliar. Namun, sektor Pertambangan dan Penggalian masih mengalami penurunan ke Rp31.080,00 miliar. Total PDRB tanpa migas meningkat menjadi Rp32.336,23 miliar, menguatkan peran diversifikasi ekonomi di luar migas. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan tetap terlihat positif pada sebagian besar sektor nonmigas. Industri Pengolahan naik ke Rp4.182,00 miliar, Perdagangan Rp5.946,66 miliar, Konstruksi Rp4.894,63 miliar, serta Informasi dan Komunikasi Rp5.482,24 miliar. Sektor Transportasi mencatat peningkatan signifikan hingga Rp869,95 miliar, sementara Penyediaan Akomodasi juga naik ke Rp689,37 miliar. Sektor Pertambangan dan Penggalian sedikit menurun ke Rp30.456,30 miliar, namun secara keseluruhan PDRB tanpa migas meningkat pesat mencapai Rp34.000,67 miliar. Hal ini menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro yang semakin kuat pada sektor-sektor nonmigas, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,91% per tahun.

Penelitian ini menggunakan metode *Local Economic Development* atau Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan 7 pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Selain itu, menurut (Munir, 2007) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Fokus dari penelitian yang dilakukan adalah penyusunan rencana pembangunan ekonomi berbasis potensi ekonomi lokal dan potensi yang berdaya saing di Kabupaten Bojonegoro menggunakan pendekatan *Local Economic Development*



menurut Edward J. Blakely yang meliputi indikator yaitu, *Locality* (Lokalitas), *Business and the Economic Base* (Bisnis dan Basis Ekonomi), *Employment Resources* (Sumber Daya Ketenagakerjaan), & *Community Resources* (Sumber Daya Komunitas) (Edition, n.d.). Dalam kaitannya dengan teori pertumbuhan ekonomi, maka Krugman (1994) mengatakan bahwa investasi sumber daya manusia menjadi lebih penting peranannya dalam pembangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis mengambil judul Pengembangan Potensi dan Daya Saing dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Pembangunan

Konsep administrasi pembangunan menurut Syafiie, 2006:99 tidak lepas dari administrasi publik sebagai payung besar konsep yang banyak berkembang di Negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Nigro, “Administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan” (Tahir Kasnawi & Ramli, 2027). Sedangkan menurut Waldo, “administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah” (Syafiie, 2006:99). Administrasi pembangunan merupakan bagian dari administrasi publik yang berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk menyelesaikan masalah sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Pemahaman administrasi pembangunan dibedakan adanya dua pengertian, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi. Administrasi bagi pembangunan menggunakan pendekatan manajemen, maka dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Sedangkan untuk menjelaskan pembangunan administrasi akan digunakan pendekatan organisasi.

Konsep pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas tergantung pada konteks serta latar belakang tujuan. Pembangunan dapat diartikan suatu usaha perubahan dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma, perencanaan, potensi alam, manusia serta budaya (Tahir Kasnawi & Ramli, 2027). Administrasi pembangunan muncul dan berkembang dari administrasi negara yang banyak membicarakan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat dan cara penanggulangannya. Administrasi pembangunan lebih memfokuskan pada masalah kemasyarakatan dan pada negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Menurut Tjokroamidjojo, “administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi” (Sudriamunawar, 2012:34). Secara spesifik dapat ditelaah bahwa usaha pembangunan sosial ekonomi mengarah pada kondisi yang lebih baik melalui kebijakan dan program yang didukung dengan pelaksanaan yang efektif.

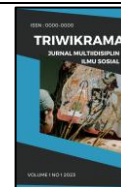
Teori administrasi pembangunan memiliki relevansi yang kuat. Pertama, dari sisi substansi, penelitian Anda membahas bagaimana potensi daerah baik yang bersumber dari sektor pertanian, industri, maupun sumber daya lainnya dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan administrasi pembangunan yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal secara efektif dan efisien. Kedua, penelitian Anda juga menyoroti aspek daya saing daerah, yang secara langsung berhubungan dengan tujuan administrasi pembangunan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, serta mampu beradaptasi dengan tantangan globalisasi dan dinamika ekonomi regional.

Teori Pembangunan

Pada dasarnya, pembangunan dapat dipahami sebagai suatu proses transformasi masyarakat menuju tatanan kehidupan yang sesuai dengan cita-cita dalam konstitusi. Dalam proses tersebut, terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu keberlanjutan dan

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



perubahan (Fatwa et al., 2025). Pembangunan juga dipandang sebagai proses yang bersifat multidimensi, karena tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup perubahan mendasar dalam struktur sosial, pola sikap masyarakat, penguatan kelembagaan nasional, pengurangan kesenjangan, serta upaya menghapuskan kemiskinan absolut (Diah Pitaloka et al., 2025).

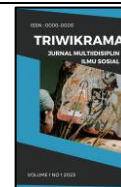
Pembangunan merupakan proses yang historical, sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu sehingga tidak akan pernah berhenti. Pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat (Syephiana et al., 2025). Pembangunan harus mampu membawa manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dalam kehidupan (Hanifah & Prabowo, 2022). Pembangunan dilakukan melalui beberapa gabungan proses sosial, ekonomi, dan institusional, yang mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan jika tidak dibarengi dengan etika maka akan menimbulkan kekerasan dan sikap tidak peduli terhadap kepentingan manusia secara umum, termasuk terhadap alam/lingkungan. Pembangunan yang hanya fokus pada sektor ekonomi tidak akan memberi nilai bagi kedudukan manusia

Berdasarkan berbagai definisi dan pengertian pembangunan yang telah dikemukakan sebelumnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah sebenarnya arti hakiki dari pembangunan itu. Pertanyaan ini muncul karena adanya berbagai perbedaan istilah-istilah yang sering digunakan dalam mengartikan pembangunan, seperti perubahan (*change*), pertumbuhan (*growth*), kemajuan (*progress*), modernisasi (*modernization*), dan pembangunan/pengembangan (*development*). Perubahan dapat terjadi tanpa unsur pembangunan atau pengembangan, demikian pula pertumbuhan dapat terjadi tanpa unsur pembangunan atau pengembangan. Bila demikian, samakah perubahan dan pertumbuhan dengan pembangunan? Pembangunan yang lazim kita pahami merupakan rujukan dari semua yang baik, positif, dan menyenangkan. Pembangunan memberikan semua yang positif dan tidak yang minus.

Penelitian peneliti menyoroti aspek daya saing daerah, yang sejalan dengan teori pembangunan modern yang menekankan pentingnya kapasitas daerah dalam menghadapi persaingan global dan regional. Daya saing di sini mencakup kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya, menciptakan inovasi, serta membangun sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan. Perspektif ini memperkaya pemahaman bahwa pembangunan bukan hanya tentang mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, melainkan juga membangun fondasi yang kuat agar daerah memiliki daya saing tinggi dalam jangka panjang. Dengan demikian, teori pembangunan sangat relevan digunakan dalam penelitian peneliti, karena memberikan kerangka untuk memahami pembangunan Bojonegoro sebagai suatu proses transformasi yang multidimensi, yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan daya saing regional.

Local Economic Development (LED)

Local Economic Development atau Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu pendekatan pembangunan yang berfokus pada pemanfaatan potensi sumber daya lokal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan (Green Leigh & Blakely, 2017). Pendekatan ini muncul sebagai respons atas ketimpangan pembangunan dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal (Handayani et al., 2022). Dalam konteks otonomi daerah, pengembangan ekonomi lokal memberikan keleluasaan bagi pemerintah lokal untuk merancang strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Proses ini tidak hanya berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada transformasi sosial dan kelembagaan yang berkelanjutan (M Amir, 2016). Oleh karena itu,



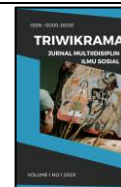
pengembangan ekonomi lokal menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan mandiri di tingkat local.

Pembangunan ekonomi lokal tercapai ketika standar hidup suatu komunitas dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui proses pembangunan manusia dan fisik yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Definisi ini menegaskan bahwa LED bukan tentang pertumbuhan demi pertumbuhan itu sendiri, melainkan tentang memastikan bahwa peningkatan kekayaan dan produktivitas benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan bagi seluruh anggota komunitas (Priana, 2016). Pertama, ini berarti pembangunan harus menetapkan dan mempertahankan standar hidup minimum bagi semua orang, dengan harapan standar tersebut akan meningkat seiring waktu. Kedua, ini berarti pembangunan harus secara aktif bekerja untuk mengurangi ketidaksetaraan, baik antar kelompok demografis (seperti usia, gender, ras, dan etnis) maupun antar kelompok spasial (seperti perkotaan versus pedesaan, atau pusat kota versus pinggiran). Ketiga, ini berarti pembangunan harus mendorong dan menggalakkan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, sehingga keuntungan saat ini tidak diperoleh dengan mengorbankan generasi mendatang. Secara keseluruhan, elemen-elemen ini memberikan visi yang lebih holistik dan adil tentang arti membangun ekonomi lokal yang benar-benar melayani masyarakatnya.

Tujuan strategi pembangunan ekonomi lokal adalah mencapai stabilitas ekonomi daerah, membangun basis ekonomi dan ketenagakerjaan yang beragam, serta mendorong keberlanjutan local (Muis, 2022). Ekonomi yang terdiversifikasi lebih tahan terhadap guncangan eksternal dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi maupun permintaan global. Stabilitas memberikan fondasi bagi investasi dan pertumbuhan, sementara keberlanjutan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak merusak sistem lingkungan atau sosial. Strategi LED yang strategis membutuhkan penyelarasan tujuan ini dengan aset dan aspirasi unik setiap komunitas. Tidak ada satu cetak biru tunggal; sebaliknya, strategi harus disesuaikan dengan konteks lokal, menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan visi jangka panjang. Komunitas yang terlalu bergantung pada satu industri atau pemberi kerja sering kali mendapati diri mereka terekspos ketika pasar global bergeser, sementara mereka yang mengejar keragaman dan ketahanan lebih siap untuk berkembang dalam jangka Panjang.

Tabel 1. 3 Reformulasi Komponen-Komponen Pembangunan Ekonomi Lokal

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Lokalitas	Lokasi fisik (dekat dengan sumber daya alam, transportasi, pasar) meningkatkan pilihan ekonomi.	Lingkungan yang berkualitas dan kapasitas komunitas yang kuat melipatgandakan keuntungan alamiah untuk pertumbuhan ekonomi.
Bisnis dan basis ekonomi	Industri berbasis ekspor dan perusahaan menciptakan lapangan kerja serta merangsang peningkatan bisnis lokal.	Klaster industri yang kompetitif dan saling terhubung dalam jaringan regional dari berbagai jenis perusahaan menciptakan pertumbuhan dan pendapatan baru.
Sumber daya ketenagakerjaan	Lebih banyak perusahaan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meskipun banyak di antaranya bergaji minimum.	Pengembangan keterampilan yang komprehensif dan inovasi teknologi mendorong terciptanya pekerjaan berkualitas dan upah yang lebih tinggi.



Sumber daya komunitas	Organisasi dengan tujuan tunggal dapat meningkatkan peluang ekonomi di komunitas.	Kemitraan kolaboratif dari berbagai kelompok masyarakat diperlukan untuk membangun fondasi yang luas bagi industri yang kompetitif.
-----------------------	---	---

Sumber: Olahan peneliti

Tujuan LED yang menekankan pentingnya identifikasi potensi lokal dan penguatan daya saing daerah. Bojonegoro memiliki sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan yang bisa menjadi basis ekonomi lokal. Melalui analisis potensi tersebut, penelitian Anda ingin menilai bagaimana sektor-sektor tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan pengangguran, serta mengurangi kemiskinan. Selain itu, pendekatan kualitatif deskriptif yang peneliti gunakan juga selaras dengan semangat LED, karena memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap kondisi riil di lapangan, termasuk peran pemerintah daerah, kebijakan RPJMD, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, teori LED memberikan pijakan konseptual bahwa pembangunan ekonomi Bojonegoro harus bertumpu pada penguatan potensi lokal dan peningkatan daya saing daerah, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian dalam tahap pendekatan kualitatif ini merupakan jenis penelitian menggunakan deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai suatu situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara *actual* dan teratur. Penelitian deskriptif menurut Nawawi (2005:63) dapat diartikan sebagai “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Sedangkan menurut Sevilla dkk (1993:71) “metode penelitian deskriptif merupakan kegiatan pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu masalah” (Pahleviannur et al., 2022).

Tipe data yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini, sebagai data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau hasil observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, catatan pejabat resmi, karya tulis ilmiah, dokumen pribadi, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

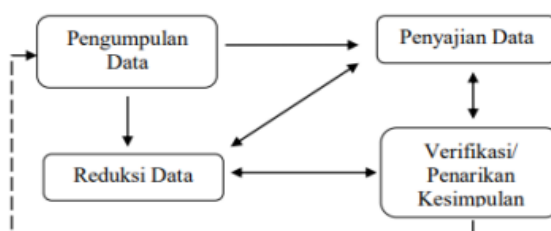
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih. Sifat penelitian ini independen, menurut (Waruwu, 2023) yaitu tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam pendidikan, penelitian deskriptif lebih berfungsi untuk pemecahan praktis dari pada pengembangan ilmu pengetahuan.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut (Creswell & Creswell, 2017), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif umumnya meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam. (Moleong, 2017) menambahkan bahwa observasi memungkinkan peneliti untuk melihat langsung interaksi dan proses yang terjadi, wawancara untuk menggali informasi dari perspektif subjek, dan dokumentasi untuk memperoleh data tertulis yang dapat mendukung hasil penelitian. Teknik-teknik ini memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti dan memastikan data yang valid.

Analisi Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan temuan penelitian yang bermakna. Menurut teknik analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kaya dan mendalam yang tidak hanya mencakup fakta, tetapi juga pemahaman partisipan terhadap fenomena yang diteliti. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh agar lebih terfokus pada tujuan penelitian. Penyajian data membantu dalam menampilkan informasi secara sistematis agar dapat dianalisis dengan baik. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang harus diverifikasi agar kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. (Miles Matthew & Huberman Michael, 2021) juga menegaskan bahwa proses analisis data kualitatif adalah siklus yang berkesinambungan di mana peneliti terus mengelola, menyusun, dan menyempurnakan data hingga mencapai pemahaman yang lengkap. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif yang dikembangkan oleh (Miles Matthew & Huberman Michael, 2021).



Gambar 2. 1 Teknik Analisis Data

Sumber: (Mulyadi, 2011)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

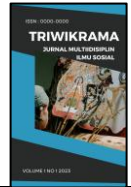
HASIL

Locality (Lokalitas)

Dimensi lokalitas dalam teori LED Edward J. Blakely menekankan pentingnya infrastruktur dasar, aksesibilitas-konektivitas, serta tata ruang dan lahan sebagai fondasi ekonomi lokal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, Bojonegoro menunjukkan kemajuan signifikan pada pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan listrik, meskipun masih terdapat ketimpangan pada wilayah tertentu, terutama daerah hutan dan kawasan selatan.

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



Data lapangan memperlihatkan bahwa pembangunan jalan, perluasan jaringan listrik, dan program peningkatan infrastruktur berlangsung masif lima tahun terakhir. Informan seperti Pak Joko dan Pak Mahesa menegaskan bahwa sebagian besar jalan desa telah diperbaiki dan seluruh desa telah teraliri listrik. Kondisi ini mempercepat mobilitas ekonomi dan meningkatkan efisiensi usaha. Namun, kendala tetap muncul pada luas wilayah, letak geografis terpencil, serta proses perizinan lahan Perhutani yang memperlambat pembangunan. Wawancara dilakukan pada, 24 Oktober 2025

Ketersediaan air bersih menjadi isu utama. Informan menegaskan bahwa meski jalan dan listrik relatif merata, distribusi air bersih belum sepenuhnya stabil, terutama di wilayah selatan. Peneliti menilai kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan infrastruktur dasar yang berdampak pada keberlanjutan ekonomi lokal.

Pada tingkat pelaku usaha, terdapat perbedaan dalam pemanfaatan infrastruktur modern. Beberapa informan seperti Bu Sintia telah memanfaatkan internet untuk administrasi dan pemasaran, sementara pelaku seperti Pak Sukanto masih menggunakan kayu bakar dan tidak mengakses internet, menunjukkan adanya kesenjangan adopsi teknologi. Wawancara dilakukan pada, 16 November 2025

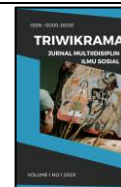
Transportasi antarwilayah dinilai lancar oleh hampir semua informan. Pembangunan jalan usaha tani turut menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing pertanian. Di sisi digital, jaringan internet telah menjangkau sebagian besar desa, dengan peningkatan signifikan di wilayah terpencil seperti Burno dan Margomulyo. Meski demikian, masih terdapat blank spot yang perlu diperbaiki.

Pelaku usaha menunjukkan variasi pemanfaatan konektivitas digital: sebagian, seperti CV Shania Plastik, telah memadukan pemasaran online dan jaringan sales; sementara usaha kecil seperti rumah produksi tahu milik Pak Sukanto masih terbatas pada pemasaran lokal. Hal ini menandakan bahwa akses fisik tidak selalu sejalan dengan kapasitas adaptasi digital masyarakat. Meskipun akses jalan memadai, beberapa informan menyebutkan bahwa lapangan kerja lokal masih minim. Hal ini memperlihatkan bahwa perbaikan konektivitas tidak otomatis menciptakan dinamika ekonomi jika tidak diikuti penguatan pasar tenaga kerja dan sektor produktif. Dari sisi tata ruang, Bojonegoro telah memiliki kerangka pengaturan ruang yang kuat melalui RTRW dan empat RDTR sebagaimana disampaikan informan dari instansi. Pembagian zona perdagangan, pertanian, perkantoran serta keberadaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), KP2B, dan lahan baku menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan lahan produktif dan pengendalian alih fungsi.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang tersebar di beberapa kecamatan juga mencerminkan strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Peneliti menilai bahwa konsistensi kebijakan dan kontrol izin alih fungsi menunjukkan tata kelola ruang yang cukup ketat dan terarah, meskipun implementasinya tetap membutuhkan koordinasi lintas institusi.

Business and The Economic Base (Bisnis dan Basis Ekonomi)

Dalam kerangka Local Economic Development (LED) Edward J. Blakely, dimensi bisnis dan basis ekonomi di Bojonegoro menunjukkan arah transformasi dari ketergantungan migas menuju struktur ekonomi yang lebih beragam. Data dan wawancara informan memperlihatkan bahwa pemerintah mulai memperkuat sektor non-migas melalui pengembangan UMKM, pertanian, industri padat karya, serta program pemberdayaan ekonomi rumah tangga.



Pada elemen sektor basis ekonomi, informan seperti Pak Joko menegaskan bahwa UMKM kini menjadi penopang ekonomi utama dengan kontribusi besar terhadap investasi non-migas, yang bahkan melampaui target tahunan. Data perizinan (16.160 NIB pada 2024) menunjukkan iklim usaha yang semakin responsif. Analisis peneliti menilai bahwa meningkatnya investasi non-migas dan pertumbuhan sektor-sektor baru seperti geopark, museum, dan rencana industri padat karya menandakan pergeseran struktur ekonomi menuju diversifikasi yang lebih sehat. Namun, fluktuasi pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan, sehingga ketergantungan historis terhadap migas tetap menjadi tantangan. Wawancara dilakukan pada, 24 Oktober 2025

Informan lain, seperti Pak Adit dan Pak Mahesa, memperkuat gambaran bahwa Bojonegoro masih ditopang sektor tradisional seperti tembakau, sepatu, dan pertanian. Program pemberdayaan seperti GAPP, Gayatri, dan Domba Kesejahteraan menunjukkan intervensi pemerintah untuk membangun basis ekonomi rumah tangga. Analisis peneliti menilai bahwa program tersebut efektif memperluas sumber pendapatan, tetapi diversifikasi ekonomi tetap memerlukan penguatan rantai nilai (hilirisasi) agar tidak hanya menghasilkan komoditas mentah. Upaya pengembangan energi baru terbarukan, seperti proyek *fuel ethanol*, membuka peluang munculnya economic base baru yang lebih berkelanjutan. Wawancara dilakukan pada, 31 Oktober 2025

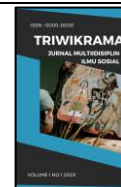
Pada tingkat usaha lokal, wawancara dengan pelaku usaha seperti Bu Sintia (CV Shania) dan Pak Sukanto (UD Adem Ayem) menunjukkan bahwa kualitas produk menjadi keunggulan utama, namun keterbatasan akses pemasaran, literasi digital, dan ketergantungan bahan baku impor masih menjadi hambatan. Peneliti menilai bahwa usaha-usaha ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari basis ekonomi lokal, tetapi belum terhubung dalam jaringan ekonomi yang lebih luas sehingga potensi ekspansinya belum maksimal.

Di wilayah masyarakat seperti Baureno dan Pejok, informan Lisa, Ainun, dan Ardi menggambarkan bahwa ekonomi lokal masih didominasi pertanian dan industri padat karya, dengan UMKM baru berkembang dalam skala kecil. Analisis peneliti menunjukkan adanya mismatch antara kualifikasi tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia, serta rendahnya diversifikasi ekonomi pada tingkat desa. Kondisi ini menegaskan perlunya perluasan pelatihan dan akses pasar untuk mendorong tumbuhnya usaha non-pertanian.

Secara keseluruhan, temuan informan menunjukkan bahwa Bojonegoro sedang bergerak menuju ekonomi yang lebih beragam melalui penguatan UMKM, pertanian, dan industri lokal, serta program pemberdayaan masyarakat. Namun, ketergantungan pada sektor tradisional masih kuat dan pertumbuhan ekonomi masih dipengaruhi fluktuasi sektor ekstraktif. Upaya diversifikasi telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan hilirisasi, energi terbarukan, pariwisata, dan pemasaran digital agar struktur ekonomi daerah benar-benar stabil dan tahan terhadap gejolak sektor migas.

Employment Resources (Sumber Daya Ketenagakerjaan)

Pada dimensi ketenagakerjaan, temuan penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bojonegoro secara kuantitas cukup memadai, namun kualitas dan kesesuaian keterampilan masih belum merata. Berbagai informan menegaskan bahwa sektor-



sektor dasar seperti pertanian, perdagangan, industri kecil, dan jasa dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal, tetapi industri yang membutuhkan keterampilan teknis khusus seperti migas, manufaktur, dan konstruksi masih bergantung pada pekerja dari luar daerah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan kemampuan tenaga kerja lokal.

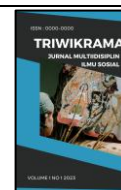
Wawancara dengan Pak Joko dan Pak Andi menunjukkan bahwa minat masyarakat mengikuti pelatihan cukup tinggi, tercermin dari pendaftar AK-1 yang mencapai sekitar 1.500 orang per tahun serta peminat pelatihan teknis yang bisa mencapai ratusan orang. Namun kapasitas pelatihan hanya menampung ± 500 peserta per tahun sehingga tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja baru. Informasi mengenai pelatihan operator alat berat, forklift, rigger, K3, hingga cleaning service menegaskan bahwa pelatihan telah diarahkan sesuai kebutuhan industri, tetapi belum seluruhnya mampu menutup kesenjangan kompetensi, terlihat dari tidak semua peserta sertifikasi berhasil lulus seleksi. Wawancara dilakukan pada, 24 Oktober 2025

Dari sisi kebijakan, Pak Mahesa menekankan bahwa pelatihan diarahkan mengikuti kebutuhan industri dan potensi ekonomi lokal, terutama UMKM yang menjadi penyumbang sekitar 50% PDRB. Analisis peneliti menunjukkan bahwa arah kebijakan ini sudah relevan, tetapi koordinasi lintas lembaga belum sepenuhnya kuat, sehingga efektivitas perencanaan pelatihan dapat terhambat. Selain itu, beberapa informan seperti Bu Hermin menegaskan bahwa tenaga kerja berkemampuan menengah cukup tersedia, tetapi industri besar tetap membutuhkan tenaga kerja bersertifikat dan berkompentensi lebih tinggi. Hal ini memperkuat temuan bahwa tingginya IPM tidak otomatis mencerminkan kesiapan tenaga kerja memasuki sektor teknis modern. Wawancara dilakukan pada, 31 Oktober 2025

Pada level perusahaan, Bu Sintia dan Pak Sukamto menjelaskan bahwa tenaga kerja baru biasanya belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan, sehingga pelaku usaha harus melakukan pelatihan internal selama 1 bulan hingga 1 tahun. Peneliti menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya *job-ready skills*, sehingga dunia usaha menanggung beban peningkatan kompetensi yang seharusnya dapat dipersiapkan melalui pelatihan vokasional daerah.

Dari perspektif pekerja muda, informan seperti Lisa, Ainun, dan Ardi mengungkapkan bahwa lapangan kerja masih terbatas dan tidak merata, sehingga banyak anak muda merantau ke kota lain. Minat besar terhadap pekerjaan pabrik dan sektor digital menunjukkan bahwa struktur ekonomi lokal belum mampu menyediakan peluang kerja yang sesuai aspirasi generasi muda. Hal ini mengindikasikan perlunya diversifikasi sektor ekonomi agar penyerapan tenaga kerja meningkat.

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa ketersediaan tenaga kerja Bojonegoro sudah cukup, tetapi kualitasnya belum mampu memenuhi kebutuhan industri spesifik. Pelatihan pemerintah telah memberikan dampak positif dan memungkinkan lahirnya IKM baru, namun masih perlu peningkatan baik dari segi kapasitas, kedalaman materi, maupun perluasan pelatihan digital dan manajerial. Tantangan terbesar terletak pada ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) serta minimnya lapangan kerja baru, sehingga penguatan pelatihan berbasis kebutuhan industri, perluasan sektor produktif, dan peningkatan koordinasi kebijakan menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.



Community Resources (Sumber Daya Komunitas)

Pada dimensi *Community Resources*, kapasitas komunitas di Kabupaten Bojonegoro tercermin dari kekuatan kelembagaan masyarakat, tingkat partisipasi warga, serta kemitraan lintas-aktor dalam pembangunan ekonomi lokal. Berbagai lembaga seperti koperasi, kelompok tani, PKK, Karang Taruna, asosiasi usaha, hingga UMKM Center berfungsi sebagai wadah penguatan ekonomi rakyat. Pemerintah memberi dukungan melalui pelatihan, pendampingan manajerial, legalitas, akses permodalan, serta pemasaran produk. Data informan memperlihatkan struktur sosial yang cukup matang dan terus berkembang.

Pak Joko menjelaskan adanya sekitar 700 koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih yang didampingi hingga pengurusan akta secara gratis. Kondisi ini menunjukkan basis kelembagaan yang luas serta komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola organisasi ekonomi rakyat. Peneliti menilai bahwa fasilitasi legalitas tanpa biaya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas koperasi dan memperluas akses mereka terhadap program pembinaan. Wawancara dilakukan pada, 24 Oktober 2025

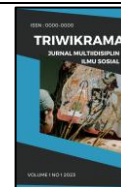
Pak Mahesa menambahkan bahwa pembinaan koperasi dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kecamatan, disertai bimtek, pembinaan, dan pameran bagi pelaku usaha. Ia juga menegaskan peran masyarakat sebagai pengawas dan pemberi masukan dalam isu kemiskinan. Analisis peneliti menunjukkan bahwa pola ini memperlihatkan kemitraan yang lebih partisipatif dan memberi ruang kontrol sosial terhadap pembangunan. Wawancara dilakukan pada, 31 Oktober 2025

Bu Hermin menekankan pendampingan koperasi dan UMKM melalui jalur formal seperti Musrenbang dan dukungan CSR. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi multi-aktor yang memperluas sumber daya bagi masyarakat. Peneliti menilai bahwa keterlibatan CSR meningkatkan diversifikasi dukungan, terutama untuk UMKM yang memerlukan pendampingan jangka panjang. Wawancara dilakukan pada, 31 Oktober 2025

Di tingkat desa, informan pekerja seperti Lisa dan Ardi menggambarkan peran PKK, Karang Taruna, dan Kelompok Tani dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. PKK memproduksi olahan pangan, Karang Taruna mendorong perputaran ekonomi lokal melalui UMKM, sementara Kelompok Tani mempermudah akses input pertanian. Peneliti melihat bahwa meski kontribusinya positif, kegiatan ini belum seluruhnya terarah pada pengembangan ekonomi desa secara formal dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat terlihat dari Musrenbang, forum informal bersama tokoh masyarakat, serta gotong royong. Informan seperti Bu Hermin, Lisa, Ainun, dan Ardi menegaskan bahwa gotong royong masih aktif melalui pembersihan desa, pembangunan fasilitas, hingga dukungan saat hajatan. Peneliti menilai bahwa solidaritas sosial dan jaringan kelompok merupakan modal sosial penting yang mempermudah koordinasi pembangunan, meski perlu diarahkan lebih kuat ke pengembangan ekonomi produktif.

Kemitraan lintas-sektor juga berjalan melalui koordinasi pemerintah-pengusaha-CSR. Pelaku usaha ikut dalam misi dagang dan promosi, sementara perusahaan besar seperti Exxon dan Pertamina menjalankan CSR yang efektif, misalnya pendampingan UMKM batik Tambakrejo hingga



mandiri. Peneliti mengidentifikasi bahwa bentuk kemitraan ini memperkuat kapasitas usaha lokal dan membuka akses pasar yang lebih luas.

Secara keseluruhan, komunitas Bojonegoro memiliki modal sosial yang kuat dan lembaga masyarakat yang aktif, didukung pola kemitraan yang produktif. Tantangannya adalah bagaimana mengarahkan kekuatan sosial tersebut agar tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Locality (Lokalitas)

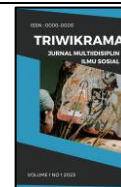
Pengembangan ekonomi lokal di Bojonegoro memiliki potensi besar, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural. Sektor pertanian (padi, jagung, tembakau), peternakan, UMKM berbasis kayu jati, industri kecil, serta wisata desa sebenarnya merupakan kekuatan utama ekonomi lokal. Namun, pemanfaatannya belum terintegrasi dalam kerangka pengembangan yang terpadu, karena belum terbentuk klaster komoditas unggulan maupun rantai nilai lokal yang kuat. Akibatnya, pengembangan ekonomi masih berjalan sektoral tanpa arah LED yang sistematis. Dari aspek sosial budaya, masyarakat memiliki modal sosial kuat berupa gotong royong dan tradisi kolektif desa, namun kearifan lokal ini belum diarahkan untuk memperkuat jejaring usaha atau kolaborasi ekonomi. Kapasitas pelaku usaha juga masih terbatas pada keterampilan tradisional, belum didukung manajemen usaha, pemasaran digital, inovasi produk, maupun pengemasan modern, sehingga nilai tambah produk rendah dan daya saing wilayah tertinggal.

Peran pemerintah desa melalui BUMDes belum maksimal karena keterbatasan SDM dan lemahnya perencanaan usaha, sehingga kontribusinya terhadap ekonomi lokal belum merata. Sinergi antara desa dan pemerintah kabupaten pun masih lemah, sehingga berbagai peluang ekonomi tidak tertangani secara optimal. Di sisi pasar, produk lokal belum terhubung dengan pasar regional maupun digital, membuat pelaku usaha kesulitan memperbesar skala produksi. Kelemahan infrastruktur ekonomi seperti jalan desa, irigasi, sentra UMKM, dan fasilitas pascatan menyebabkan ketimpangan pertumbuhan antardesa dan menghambat efisiensi distribusi maupun produksi. Jejaring antar-petani, UMKM, kelompok tani, dan BUMDes juga masih lemah sehingga aliran informasi, inovasi, dan teknologi berjalan lambat. Selain itu, tingkat adopsi teknologi masih terbatas baik pada pertanian maupun UMKM, menyebabkan produktivitas lokal belum kompetitif.

Secara keseluruhan, Bojonegoro memiliki keunggulan sumber daya lokal yang besar, tetapi belum dikelola secara optimal karena keterbatasan kapasitas pelaku usaha, kelembagaan desa, infrastruktur ekonomi, jejaring usaha, dan adopsi teknologi. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi lokal memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, serta kebijakan terpadu antara desa dan pemerintah daerah agar potensi lokal dapat berkembang menjadi basis ekonomi yang berkelanjutan.

Business and The Economic Base (Bisnis dan Basis Ekonomi)

Struktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro saat ini berada pada fase transisi dari ketergantungan migas menuju sektor ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pemerintah mulai memperkuat pertanian, UMKM, dan industri padat karya sebagai fondasi ekonomi baru, namun dominasi migas dan lemahnya infrastruktur membuat diversifikasi berjalan belum stabil. Ketahanan ekonomi daerah masih rentan karena sektor alternatif belum berkembang secara optimal dan membutuhkan konsistensi kebijakan serta penguatan kapasitas SDM. Pengembangan UMKM menjadi prioritas melalui legalisasi usaha, pelatihan, pemasaran, dan permodalan. Namun banyak UMKM tidak dapat bertahan akibat minimnya motivasi, kurang pendampingan lanjutan, serta lemahnya manajerial. Ini menunjukkan bahwa masalah UMKM



bukan hanya teknis, tetapi terkait kesiapan internal pelaku usaha dan belum terintegrasinya program lintas dinas.

Peningkatan investasi non-migas menunjukkan iklim usaha yang membaik, tetapi pemusatan investasi di wilayah berinfrastruktur baik menyebabkan ketimpangan ekonomi antarwilayah. Daerah dengan jalan buruk, listrik tidak stabil, dan air terbatas kurang menarik bagi investor, sehingga lapangan kerja tidak merata. Selain itu, kebutuhan industri terhadap tenaga kerja terampil tidak sebanding dengan kemampuan SDM lokal, membuat perusahaan masih mengandalkan tenaga kerja luar daerah. Upaya hilirisasi melalui program pertanian dan peternakan seperti ayam petelur, domba, dan pengolahan hasil pertanian sejalan dengan prinsip LED, tetapi masih terkendala skala kecil, sarana terbatas, dan belum tersambungunya produksi ke pasar yang stabil. Begitu pula pengembangan energi terbarukan seperti proyek ethanol menawarkan peluang besar, tetapi masih membutuhkan kesiapan bahan baku, infrastruktur, dan tenaga kerja.

Temuan lapangan menunjukkan UMKM dan masyarakat masih mengalami kendala modal, pemasaran, dan informasi, menandakan ekosistem dukungan usaha belum terintegrasi dan belum menjangkau seluruh pelaku di tingkat bawah. Secara keseluruhan, elemen *Business and the Economic Base* menunjukkan bahwa arah ekonomi Bojonegoro sudah bergerak menuju struktur yang lebih beragam dan inklusif, namun fondasinya masih lemah. Penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan sistem pembinaan UMKM menjadi kunci agar diversifikasi ekonomi berjalan efektif dan mampu membangun ekonomi daerah yang lebih tahan, merata, dan berkelanjutan.

Employment Resources (Sumber Daya Ketenagakerjaan)

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja lokal cukup besar, tetapi tidak sejalan dengan kebutuhan industri yang memerlukan keterampilan teknis khusus. Banyak lulusan baru tidak terserap karena kompetensi mereka belum memenuhi standar perusahaan. Pemerintah telah menyediakan berbagai pelatihan mulai dari operator, otomotif, pengelasan, hingga kewirausahaan namun kapasitas peserta sangat terbatas dan kualitas pelatihan belum sepenuhnya sesuai standar industri modern, sehingga lulusan masih memerlukan penyesuaian tambahan. Beberapa industri seperti migas, manufaktur, rokok, dan pabrik sepatu tetap bergantung pada tenaga kerja luar daerah karena kesenjangan keterampilan tenaga kerja lokal. Selain itu, banyak anak muda memilih bekerja di kota besar akibat minimnya peluang kerja di daerah, menyebabkan potensi tenaga kerja produktif tidak berkembang di Bojonegoro. Minat generasi muda terhadap sektor digital dan pekerjaan pabrik sebenarnya dapat menjadi peluang, tetapi belum didukung ekosistem usaha yang memadai.

Motivasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan juga masih rendah karena prosedur dianggap rumit, biaya transportasi menjadi kendala, dan informasi pelatihan tidak tersampaikan dengan baik. Ketimpangan wilayah juga terlihat: beberapa kecamatan memiliki pabrik penyerap tenaga kerja, sementara daerah lain masih bergantung pada pertanian yang tidak menyediakan banyak opsi kerja bagi anak muda.

Secara keseluruhan, potensi tenaga kerja lokal belum dimanfaatkan optimal. Kesenjangan keterampilan, terbatasnya kapasitas pelatihan, persebaran lapangan kerja yang tidak merata, serta rendahnya motivasi masyarakat menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penguatan *Employment Resources* perlu dilakukan melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri (*demand-driven training*), peningkatan kapasitas lembaga pelatihan, perluasan sektor ekonomi produktif, dan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor usaha agar tenaga kerja

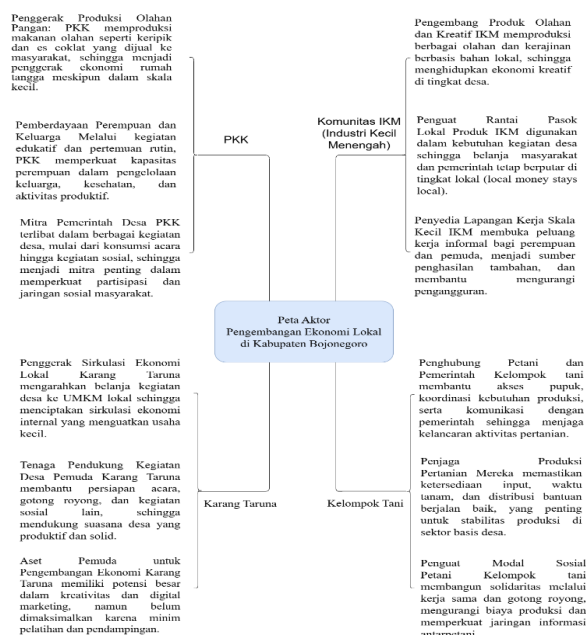
lokal dapat terserap maksimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Community Resources (Sumber Daya Komunitas)

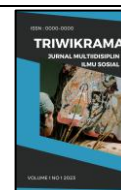
Berdasarkan hasil temuan lapangan, kelompok tani, PKK, dan Karang Taruna merupakan tiga komunitas yang memiliki kontribusi nyata dalam dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Bojonegoro. Ketiga kelompok ini memiliki peran penting, namun kapasitas dan efektivitasnya masih perlu diperkuat agar dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi lokal.

Kelompok Tani menjadi komunitas paling strategis di sektor pertanian. Mereka berperan sebagai penghubung antara kebutuhan petani dan penyedia input produksi seperti pupuk. Meski demikian, kegiatan kelompok tani masih dominan pada fungsi administratif dan distribusi kebutuhan dasar. Peran kelompok ini belum diarahkan pada inovasi pertanian, pengolahan hasil panen, atau pengembangan usaha produktif yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi desa. PKK memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Kegiatan produksi makanan olahan menunjukkan adanya kemampuan kreatif dan peluang UMKM. Namun, kelemahan terletak pada skala usaha yang masih kecil, keterbatasan strategi pemasaran, serta belum adanya pembinaan yang terstruktur. Potensi PKK sebagai penggerak ekonomi perempuan belum dimaksimalkan. Karang Taruna menunjukkan inisiatif ekonomi melalui dukungan bagi UMKM lokal dan partisipasi dalam pembangunan desa. Meskipun demikian, peran ini belum dijalankan secara sistematis sebagai program penguatan ekonomi pemuda. Kapasitas manajerial, digitalisasi usaha, dan jejaring kemitraan masih perlu ditingkatkan agar Karang Taruna dapat menjadi motor inovasi ekonomi desa.

Secara keseluruhan, tiga komunitas ini memiliki modal sosial yang kuat, namun belum terintegrasi dalam strategi pembangunan ekonomi lokal. Penguatan organisasi, peningkatan kapasitas usaha, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi langkah penting agar komunitas ini benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 3.1 Peta Aktor Pengembangan Ekonomi Lokal Kab. Bojonegoro
Sumber : Olahan peneliti, 2025



4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kemajuan pada empat elemen LED, namun masih menghadapi sejumlah hambatan penting. Pada aspek *locality*, infrastruktur jalan dan listrik sudah cukup merata, tetapi akses air bersih dan koordinasi antar Lembaga terutama terkait lahan Perhutani masih menjadi kendala. Pada dimensi *business and the economic base*, ketergantungan pada sektor migas masih kuat sehingga potensi pertanian, UMKM, industri pengolahan, dan perdagangan belum berkembang optimal akibat minimnya dukungan kebijakan dan investasi. Dalam *employment resources*, tenaga kerja lokal melimpah tetapi kualitas keterampilannya belum memenuhi kebutuhan industri; meskipun beragam pelatihan (operator, otomotif, pengelasan, *cleaning service*, K3, hingga BLK Provinsi) tersedia, kapasitasnya terbatas sehingga peningkatan kompetensi belum merata. Sementara pada *community resources*, komunitas seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani cukup aktif, tetapi modal sosial yang ada belum berkembang menjadi kekuatan ekonomi karena kapasitas organisasi dan inovasi masih rendah. Secara keseluruhan, Bojonegoro sudah berada pada arah pembangunan yang tepat, namun diperlukan penguatan kebijakan, kolaborasi, dan strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Saran

Pengembangan Bojonegoro menekankan perbaikan terpadu pada empat elemen LED. Pada *locality*, diperlukan percepatan penyediaan air bersih, penguatan koordinasi dengan Perhutani, serta peningkatan infrastruktur dasar. Pada *business and the economic base*, pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat UMKM, dan memodernisasi sektor pertanian agar bernilai tambah. Untuk *employment resources*, penting dilakukan pemetaan kebutuhan keterampilan, perluasan pelatihan vokasi, serta upskilling tenaga kerja lokal. Pada *community resources*, kelompok masyarakat perlu diberdayakan menuju kegiatan ekonomi produktif melalui peningkatan kapasitas dan perluasan kemitraan. Jika dilakukan secara terpadu, langkah-langkah ini berpotensi memperkuat daya saing dan keberlanjutan pembangunan ekonomi Bojonegoro.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiseputra, R Yudhistira Adianita, Happy Susilowati, Dados Isna, Aulida. (2024). 6(2), 65-74.
- Bojonegoro, D. I. K. (2016). Kebijakan industri kreatif mendorong ekonomi kerakyatan di kabupaten bojonegoro. 10(1), 31-48.
- Evi Indah Permata Sari & Sutrisno. (2023). 10(4), 577-596.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v10i4.4974>
- Fitryani, V., Sumbawati, N. K., Perbankan, K., Samawa, U., Pembangunan, E., Samawa, U., Pembangunan, E., & Samawa, U. (2019). Analisis Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Komoditas Jagung Di Kawasan Pedesaan Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. 7(1), 54-63.
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Oktariani, N. (2021). Teori pembangunan ekonomi. 2(2), 113-128.
- Lq, A., Shift, D. A. N., Sektor, S., Pertanian, K., Pangan, T., Pdrb, M., & Bojonegoro, K. (2023). Analisis lq dan shift share sektor dan komoditas pertanian tanaman pangan dalam meningkatkan pdrb kabupaten bojonegoro periode 2018-2021.



- M. Sobry, & Prosmala Hadisaputra, M. P. . (2020). Penelitian kualitatif Penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya (Issue c).
http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani._ZA_2014-Dasar_dasar_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf
- Mustofa. (2015). Metode Penelitian dengan NPF dan Roa. Jurnal, 1-9.
- Najiyati, S., Arthur, R., & Nurwati, N. (2015). Synergism of Local Economic Development Components for Increase in Social Welfare.
- Penghasil, D., Dan, M., & Bumi, G. A. S. (2024). Analisis pengembangan wilayah kabupaten bojonegoro sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi. 1(2), 1009-1015.
- Priana, W. (2016). ECONOMIC GROWTH MODEL LOCATION QUOTIENT (LQ) IN EAST JAVA PROVINCE. 16(1).
- Ruhansih, D. S. (2017). EFEKTIVITAS STRATEGI BIMBINGAN TEISTIK UNTUK PENGEMBANGAN RELIGIUSITAS REMAJA (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015). QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS), 2(2), 28-33.
- V. Wiratna Sujarweni. (2014). Metodologi Penelitian. PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 107. In M. Sobry, & Prosmala Hadisaputra, M. P. . (2020). Penelitian kualitatif Penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya (Issue c).
http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani._ZA_2014-Dasar_dasar_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf
- V. Wiratna Sujarweni. (2014). Metodologi Penelitian. PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 107.